

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Erlinda¹, Mega Nugraha², Sunarto³

^{1,2,3} Universitas Tamansiswa Palembang

Email : linda.iqbal@gmail.com, geganugraha@gmail.com, sunarto@unitaspalembang.ac.id

Abstract, Erlinda, *Implementation of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 25 of 2008 concerning Library Personnel Standards at SMA Negeri 3 Kayu Agung, Ogan Komering Ilir Regency.* This research is included in the type of qualitative research. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation studies. The data analysis technique was carried out by analyzing the data of an interactive model from Miles and Huberman. Research results: 1) Communication has not gone well, so the results achieved are not optimal. In the future, it is hoped that there will be better communication and coordination, so that every problem that occurs is related to the implementation of Permendiknas RI No. 25 of 2008; 2) The intensity of training that is not too routine plus the competence of less qualified employees causes the training provided to have less effect on work achievement; 3) The implementation of Permendiknas RI No. 25 of 2008 concerning Library Personnel Standards at SMA Negeri 3 Kayuagung already has a clear operating system (SOP) standard; 4) In implementing policies, all policy implementers have a high commitment, and as much as possible will work with full dedication and responsibility for the achievement of the desired goals, as stated in Permendiknas RI No. 25 of 2008 concerning Manpower Standards The library.

Keywords: Implementation, Standards, and Library Personnel

Abstrak, Erlinda, Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Di SMA Negeri 3 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian: 1) Komunikasi belum berjalan dengan baik, sehingga hasil yang dicapai menjadi belum optimal. Kedepan, diharapkan akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi, agar setiap permasalahan yang terjadi terkait dengan Implementasi Permendiknas RI No. 25 tahun 2008; 2) Intensitas pelatihan yang tidak terlalu rutin ditambah lagi kompetensi dari pegawai yang kurang mumpuni menyebabkan pelatihan yang diberikan menjadi tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian kerja; 3) Implementasi Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung sudah memiliki *standart operating system (SOP)* yang jelas; 4) Dalam mengimplementasikan kebijakan, Seluruh pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi, dan semaksimal mungkin akan bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang diinginkan, seperti yang tertuang dalam Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Standar, dan Tenaga Perpustakaan

1. PENDAHULUAN

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan meningkatkan kualitas pendidikan, keberadaan perpustakaan memainkan peran yang sangat krusial. Perpustakaan bukan hanya berfungsi sebagai wahana belajar, tetapi juga sebagai gudang ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, perpustakaan menjadi sarana utama untuk menumbuhkan minat baca, yang merupakan kunci menuju kecerdasan dan pengetahuan yang lebih baik. Membaca secara aktif merupakan jalan utama untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kecerdasan individu, serta berkontribusi pada pembangunan intelektual bangsa.

Peran perpustakaan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sangat terkait dengan pengembangan kecerdasan yang tinggi. Dengan menyediakan akses yang luas terhadap berbagai jenis bacaan dan materi pembelajaran, perpustakaan berkontribusi dalam memperkuat proses pendidikan. Peningkatan minat baca di kalangan masyarakat dapat menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional, yang mencakup pengembangan keterampilan kognitif dan pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu.

Pembinaan minat baca telah menjadi prioritas utama UNESCO sejak tahun 1972. Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat membaca dengan memberikan penekanan pada penciptaan lingkungan membaca yang mendukung. Upaya ini mencakup penyediaan akses mudah ke berbagai jenis bacaan dan materi informasi, serta mendorong kebiasaan membaca di semua lapisan masyarakat. Dengan lingkungan yang mendukung dan fasilitas yang memadai, diharapkan minat baca dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam konteks pendidikan, perpustakaan berperan sebagai pendukung utama dalam pengembangan minat baca. Dengan menyediakan berbagai sumber daya dan materi bacaan yang relevan, perpustakaan membantu menciptakan budaya membaca yang positif. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan, mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik, dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan cerdas.

Penciptaan lingkungan membaca yang mendukung semua jenis bacaan dapat diwujudkan melalui keberadaan perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan layanan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bahan bacaan dan pustaka. Menurut Kalida (2015:6), perpustakaan adalah lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat akan informasi ilmiah, yang mencakup berbagai jenis bahan bacaan dan pustaka.

Perpustakaan tidak hanya menyediakan buku, tetapi juga berbagai sumber daya informasi lainnya seperti jurnal, majalah, dan media digital. Fungsinya sebagai penyedia informasi menjadikannya pusat pembelajaran yang esensial dalam pengembangan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat. Dengan akses yang mudah dan berbagai koleksi bahan bacaan, perpustakaan memfasilitasi penciptaan lingkungan membaca yang inklusif dan mendukung kebutuhan informasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku, perpustakaan berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat dengan menyediakan fasilitas untuk belajar, berinovasi, dan memperluas wawasan. Melalui berbagai program, kegiatan, dan layanan, perpustakaan

berkontribusi dalam menciptakan budaya membaca yang positif dan mendukung pendidikan sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan memberikan akses informasi yang luas kepada semua orang.

Dengan demikian, perpustakaan adalah elemen kunci dalam menciptakan lingkungan membaca yang mendukung semua jenis bacaan. Peranannya dalam menyediakan akses informasi dan bahan bacaan berkualitas sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat secara keseluruhan

Beberapa permasalahan yang peneliti temukan pada perpustakaan sekolah di SMA Negeri 3 Kayuagung antara lain yakni “Ruang perpustakaan hanya tempat menyimpan buku, jumlah dan jenis buku yang kurang memadai, siswa enggan membaca di ruang perpustakaan karena fasilitas ruangan belum dirasakan nyaman, masih rendahnya minat baca siswa, serta pengelola perpustakaan kurang memperhatikan pelayanan kepada pengunjung.(hasil wawancara peneliti dengan Samuel Siregar, siswa SMAN 3 Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir) .

Permasalahan yang dapat dirasakan secara nyata oleh para pengunjung secara tidak langsung sebagai pembaca yaitu terlihat jelas ada tumpukan buku yang tersusun rapi sebaliknya ada juga yang berantakan dan dibiarkan begitu saja. Menurut Ahmad Rizki (siswa) begitu peneliti meminta informasinya mengenai kelengkapan koleksi buku perpustakaan sekolah di SMAN 3 Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan: “jauh dari yang diharapkan kalau buku yang ada di perpustakaan hanya sebatas koleksi buku-buku lama dan walaupun ada yang baru buku tersebut kurang menarik untuk dibaca, harapan kami buku-buku tersebut haruslah banyak koleksinya sehingga siswa tertarik untuk datang, matanya tertuju kepada judul buku tersebut sehingga ada minat untuk dibaca. Selanjutnya masalah yang berhubungan dengan kondisi di ruangan perpustakaan dengan keadaan ruangan pengap, panas, belum lagi tumpukan buku berantakan tidak tertata. Dengan kondisi tersebut, siswa menjadi enggan untuk berkunjung ke perpustakaan. Sementara menurut guru SMAN 3 Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai masalah tenaga perpustakaan yang kurang memenuhi standar, baik pelayanan teknik, pelayanan pembaca maupun ilmu kepustakaan. Menurut Ibu Dian Tri Anggraini, S.Pd, tenaga perpustakaan harus ditunjuk orang yang dianggap mampu dalam ilmu kepustakaan, mampu mengelola perpustakaan dengan baik, mampu melayani secara teknis maupun pelayanan terhadap pengunjung. Bukan duduk diam, sulit senyum, dan menegangan serta yang dilakukan hanya sebatas memberikan pelayanan seperlunya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sumber ilmu memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki minat dan budaya membaca. Menurut Kalida (2015:6), "Perpustakaan adalah suatu lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk bahan bacaan dan bahan pustaka lainnya." Dengan demikian, perpustakaan bukan hanya sekadar tempat untuk menyimpan buku, tetapi juga merupakan pusat penyebaran informasi dan pengetahuan yang esensial bagi pengembangan kecerdasan masyarakat.

Sebagai lembaga yang menyediakan berbagai bentuk bahan bacaan dan pustaka, perpustakaan memainkan peran kunci dalam membangun minat baca di masyarakat. Melalui koleksi yang beragam dan akses yang mudah, perpustakaan dapat memfasilitasi kebutuhan informasi dari berbagai kalangan, mendorong masyarakat untuk terus belajar, dan mengembangkan kebiasaan membaca yang positif. Keberadaan perpustakaan yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan budaya membaca yang luas dan inklusif.

Perpustakaan juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan pembelajaran yang dinamis. Dengan menyediakan berbagai program dan kegiatan, seperti seminar, pelatihan, dan diskusi, perpustakaan dapat mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkelanjutan. Peran ini menjadikannya sebagai lembaga yang mendukung pendidikan sepanjang hayat dan mempromosikan kebiasaan membaca di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, perpustakaan bukan hanya memenuhi fungsi sebagai penyedia bahan bacaan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mempengaruhi minat baca dan budaya literasi masyarakat. Dengan memanfaatkan perpustakaan secara efektif, masyarakat dapat diharapkan memiliki minat baca yang tinggi dan budaya membaca yang kuat, yang pada gilirannya mendukung perkembangan kecerdasan dan pengetahuan secara keseluruhan.

Menurut Bafadal (2015:3), "Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non-book material) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh pemakainya."

Definisi ini menegaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai unit kerja dalam organisasi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai jenis bahan pustaka secara sistematis. Bahan pustaka ini mencakup buku dan materi non-buku,

seperti jurnal, majalah, dokumen digital, dan media lainnya. Pengelolaan yang sistematis dan sesuai aturan ini memastikan bahwa bahan pustaka dapat diakses dan digunakan dengan efisien oleh pemakainya.

Perpustakaan, dalam konteks ini, tidak hanya berperan sebagai penyimpan informasi tetapi juga sebagai penyedia sumber daya yang dikelola secara terstruktur untuk memfasilitasi akses informasi. Dengan pengelolaan yang baik, perpustakaan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan dan informasi masyarakat, mendukung penelitian, serta memperluas wawasan dan pengetahuan.

Dalam perannya sebagai sumber informasi, perpustakaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua bahan pustaka yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, perpustakaan harus terus memperbarui dan memperbaiki koleksinya, serta menyediakan layanan yang memadai untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemakainya.

Munculnya berbagai bentuk dan model perpustakaan, baik di perkotaan maupun di desa, mencerminkan keragaman pendekatan dalam memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. Bentuk-bentuk perpustakaan ini meliputi taman bacaan masyarakat, rumah baca, sudut baca, perpustakaan anak, perpustakaan komunitas, serta perpustakaan sekolah. Masing-masing model perpustakaan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca dan akses terhadap informasi.

Namun, efektivitas perpustakaan sekolah sangat bergantung pada bagaimana perpustakaan tersebut dikelola dan ditata. Walaupun sebuah perpustakaan sekolah mungkin memiliki ruang yang luas, koleksi buku yang banyak, dan perlengkapan yang lengkap, semua ini tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak dikelola dengan baik. Penataan dan pengelolaan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas perpustakaan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung proses belajar mengajar.

Sebagai contoh, perpustakaan yang memiliki koleksi buku beraneka ragam namun tidak memiliki sistem pengorganisasian yang baik, seperti pengkatalogan atau pengaturan rak yang efisien, akan menyulitkan pengguna dalam mencari dan mengakses buku. Demikian pula, perlengkapan perpustakaan seperti komputer, meja, dan kursi harus dikelola dengan baik untuk mendukung lingkungan belajar yang kondusif. Tanpa pengelolaan yang baik, keberadaan fasilitas fisik dan materi pustaka tidak akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana pengelolaan dan penataan yang efektif untuk memastikan bahwa perpustakaan sekolah dapat berfungsi sebagai pusat sumber

informasi dan belajar yang efisien. Ini mencakup pengaturan koleksi buku, penyediaan akses mudah, pelatihan staf perpustakaan, dan penerapan sistem manajemen yang baik, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan perpustakaan dalam mendukung pendidikan dan literasi di sekolah

Kepala perpustakaan sekolah memegang peranan krusial dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Tugas utama kepala perpustakaan adalah mengkoordinasi seluruh kegiatan perpustakaan, mulai dari mengatur tenaga kerja hingga memastikan fasilitas perpustakaan berfungsi dengan baik. Kepala perpustakaan bertanggung jawab untuk menggerakkan seluruh sumber daya dan fasilitas yang ada agar perpustakaan dapat beroperasi secara optimal, mendukung proses belajar mengajar, dan memenuhi kebutuhan informasi para siswa dan staf.

Unit tata usaha dalam perpustakaan sekolah menangani berbagai aspek administratif dan manajerial. Tugas unit ini meliputi pengelolaan surat menyurat, administrasi personalia, pengelolaan keuangan, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan. Dengan kata lain, unit tata usaha memastikan bahwa semua aspek administratif dan logistik perpustakaan dikelola dengan baik, sehingga operasional perpustakaan dapat berjalan lancar dan efektif.

Sementara itu, tugas pelayanan teknis berfokus pada pengolahan bahan-bahan pustaka. Unit ini bertanggung jawab untuk memproses bahan pustaka secara sistematis, mengikuti aturan yang berlaku. Aktivitas di unit pelayanan teknis mencakup pengadaan bahan pustaka, inventarisasi, klasifikasi, serta penandaan buku dengan label atau "call number". Selain itu, unit ini juga mengurus penempatan buku di rak atau lemari yang telah disediakan serta memastikan bahwa semua bahan pustaka terorganisir dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Secara keseluruhan, ketiga unit ini—kepala perpustakaan, unit tata usaha, dan pelayanan teknis—bekerja sama untuk memastikan perpustakaan sekolah berfungsi dengan baik. Kepala perpustakaan mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan, unit tata usaha menangani aspek administratif dan keuangan, sementara unit pelayanan teknis fokus pada pengolahan dan pengorganisasian bahan pustaka. Keterpaduan antara ketiga unit ini sangat penting untuk menciptakan perpustakaan yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III.

George C. Edward III (1980), mengemukakan empat variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), *disposition* atau sikap (*attitudes*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

- **Komunikasi**

Komunikasi dalam konteks kebijakan pendidikan mencakup cara kebijakan tersebut disampaikan kepada organisasi publik, serta bagaimana informasi ini dipahami dan diterima. Komunikasi yang efektif melibatkan tiga elemen kunci: transmisi komunikasi, kejelasan kebijakan, dan konsistensi. Transmisi komunikasi merujuk pada proses bagaimana informasi tentang kebijakan disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pelaksana dan penerima manfaat. Kejelasan kebijakan adalah penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan. Konsistensi dalam komunikasi memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak berubah-ubah, sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap kebijakan.

- **Resources**

Aspek resources atau sumber daya berfokus pada ketersediaan dan kecakapan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia, untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Ini meliputi evaluasi terhadap kompetensi pelaksana kebijakan, pelatihan yang diperlukan, dan ketersediaan fasilitas dan alat yang mendukung pelaksanaan. Tanpa sumber daya manusia yang terampil dan cukup, kebijakan pendidikan tidak dapat diimplementasikan dengan efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa para pelaksana memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara optimal.

- **Disposition**

Disposition berhubungan dengan sikap dan kesiapan para pelaksana untuk menerapkan kebijakan pendidikan. Kecakapan teknis saja tidak cukup tanpa adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kesediaan ini mencakup motivasi, dukungan, dan komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan baik. Tanpa adanya disposisi yang positif dari pelaksana, implementasi kebijakan bisa gagal meskipun sumber daya dan komunikasi sudah memadai.

- **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berkaitan dengan bagaimana organisasi birokrasi yang mengelola implementasi kebijakan pendidikan disusun. Tantangan utama di sini adalah menghindari fragmentasi birokrasi yang dapat menghambat efektivitas implementasi. Struktur yang tidak sesuai atau kurang koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat seringkali menyebabkan inefektivitas dalam implementasi kebijakan. Di Indonesia, sering terjadi masalah koordinasi dan kerja sama antar lembaga, yang berdampak negatif pada pelaksanaan kebijakan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan adanya struktur organisasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Kerangka Berfikir

Teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edwards.

- 1) Komunikasi.

Implementasi kebijakan publik yang sukses memerlukan pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh para pelaksana dan kelompok sasaran. Untuk mencapai keberhasilan ini, beberapa faktor kunci harus diperhatikan agar implementasi dapat dilakukan secara efektif dan mengurangi risiko distorsi. Berikut adalah tiga aspek penting yang harus diperhatikan:

1. Penyaluran Informasi yang Baik

Penyaluran (transmisi) informasi mengenai kebijakan harus dilakukan dengan cara yang baik dan efektif. Ini berarti bahwa informasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas dan tepat kepada semua pihak terkait, terutama kelompok sasaran. Proses transmisi yang baik memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia dan dapat diakses oleh mereka yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Penyaluran informasi yang tidak memadai atau tidak efektif dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan distorsi dalam implementasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi keberhasilan kebijakan.

2. Kejelasan dalam Pelaksanaan

Kejelasan dalam kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaksana memahami apa yang diharapkan dari mereka. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak disampaikan dengan jelas, pelaksana

2) Sumberdaya.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi yang jelas dan konsisten, tetapi juga memerlukan dukungan yang memadai dalam hal sumber daya. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah elemen krusial dalam implementasi kebijakan. Ini mencakup kompetensi dan keterampilan para implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Jika implementor tidak memiliki keterampilan atau pelatihan yang memadai, mereka mungkin tidak dapat menerapkan kebijakan dengan efektif. Wahab (2010) menekankan pentingnya kompetensi implementor sebagai bagian dari sumber daya manusia. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kebijakan dengan benar. Pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat menangani tantangan yang mungkin muncul selama implementasi.

2. Sumber Daya Materi

Selain sumber daya manusia, sumber daya materi juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Ini mencakup perlengkapan, fasilitas, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksana kebijakan mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif. Misalnya, jika sebuah kebijakan memerlukan penggunaan teknologi tertentu atau fasilitas khusus, maka ketersediaan dan kualitas dari sumber daya materi ini harus dipastikan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

3. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah komponen penting lainnya yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Tanpa anggaran yang cukup, pelaksanaan kebijakan mungkin terbatas dan tidak dapat dilakukan dengan optimal. Wahab (2010) menjelaskan bahwa dukungan finansial diperlukan untuk menutupi berbagai biaya yang terkait dengan implementasi kebijakan, seperti pengadaan perlengkapan, biaya operasional, dan pelatihan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat upaya untuk

mencapai tujuan kebijakan dan memberikan pelayanan yang diharapkan kepada masyarakat.

4. Metoda Implementasi

Metoda implementasi juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Metoda ini mencakup strategi dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkan kebijakan. Tanpa metoda yang efektif, meskipun sumber daya manusia, materi, dan finansial tersedia, pelaksanaan kebijakan mungkin tidak mencapai hasil yang diinginkan. Metoda yang baik memastikan bahwa proses implementasi dilakukan secara terstruktur dan sistematis, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun komunikasi yang jelas dan konsisten tentang kebijakan sangat penting, keberhasilan implementasi kebijakan juga memerlukan dukungan yang memadai dalam hal sumber daya manusia, materi, finansial, dan metoda. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan hanya akan tetap sebagai dokumen tanpa wujud nyata dalam pemecahan masalah dan pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi, berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengeksekusi kebijakan pendidikan tersebut kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Bagaimanapun dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan ini sangat ditentukan konsistensi tersebut.

4) Struktur birokrasi.

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu: (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan implementasi **Permendiknas No. 25 Tahun 2008** tentang standar tenaga perpustakaan di **SMAN 3 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir**. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana metode ini diterapkan:

- Metode Deskriptif Kualitatif

1. Tujuan Penelitian

Menginterpretasikan dan Mendeskripsikan: Peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan diterapkan di SMAN 3 Kayuagung. Penelitian ini akan memberikan gambaran kongkret mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Pengumpulan Data

Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait seperti kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pengelola sekolah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai implementasi kebijakan.

Observasi: Mengamati secara langsung proses dan praktik yang diterapkan di perpustakaan SMAN 3 Kayuagung, termasuk pemanfaatan standar tenaga perpustakaan dan kegiatan sehari-hari di perpustakaan.

Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan seperti laporan kegiatan perpustakaan, kebijakan internal sekolah, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan implementasi Permendiknas No. 25 Tahun 2008.

3. Analisis Data

Deskripsi Data: Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diorganisasi dan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran lengkap tentang implementasi kebijakan.

Interpretasi: Peneliti akan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu yang berkaitan dengan bagaimana standar tenaga perpustakaan diterapkan. Fokus utama adalah pada efektivitas implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Evaluasi: Mengkaji bagaimana standar tenaga perpustakaan sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 25 Tahun 2008 dan menilai apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau terdapat hambatan dan tantangan yang perlu diatasi.

4. Pelaporan

Hasil Penelitian: Menyusun laporan yang mendetail mengenai hasil penelitian, termasuk deskripsi tentang bagaimana kebijakan diterapkan, kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Rekomendasi: Memberikan saran berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan pemenuhan standar tenaga perpustakaan di SMAN 3 Kayuagung.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi Permendiknas No. 25 Tahun 2008, serta memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana standar tenaga perpustakaan dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam konteks pendidikan di SMAN 3 Kayuagung.

5. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teori implementasi yang digunakan adalah Teori George Edward III, yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut teori ini, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Ini mencakup bagaimana kebijakan disampaikan, kejelasan informasi, dan konsistensi dalam pesan yang disampaikan. Selain itu, sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk tenaga manusia maupun materi, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana juga mempengaruhi keberhasilan implementasi; pelaksana yang memiliki komitmen dan motivasi tinggi akan lebih mampu menghadapi tantangan. Terakhir, struktur birokrasi yang efisien dan terkoordinasi akan mendukung pelaksanaan kebijakan dengan menghindari hambatan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam organisasi. Oleh karena itu, dalam membahas implementasi kebijakan di SMA Negeri 3 Kayuagung, penelitian ini akan mengevaluasi keempat faktor tersebut untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

Dalam implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung, hampir semua informan sepakat bahwa komunikasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Komunikasi yang efektif memfasilitasi pemahaman yang jelas mengenai kebijakan yang diterapkan, serta mendukung koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua

pihak memahami tujuan, prosedur, dan tanggung jawab mereka dengan benar. Namun, kenyataannya, komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ini di SMA Negeri 3 Kayuagung masih belum berjalan dengan baik. Kekurangan dalam komunikasi menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan jelas, yang berdampak pada proses implementasi yang kurang optimal. Kesulitan dalam menyampaikan dan menerima informasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam proses komunikasi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Untuk meningkatkan hasil implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 di masa depan, diharapkan akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait. Peningkatan komunikasi yang lebih sistematis dan transparan akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang muncul dan menemukan solusi yang lebih efektif. Dengan adanya perbaikan dalam komunikasi, diharapkan setiap permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dapat diatasi dengan lebih efisien, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan.

Terkait dengan sumber daya, diperoleh informasi bahwa pelatihan khusus mengenai Implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan telah diberikan kepada pegawai di SMA Negeri 3 Kayuagung. Namun, intensitas pelatihan yang tidak rutin dan kompetensi pegawai yang kurang memadai telah mengakibatkan pelatihan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian kerja. Pelatihan yang tidak terjadwal secara konsisten dan kurangnya keahlian yang dimiliki pegawai dapat menghambat proses implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitasnya.

Dengan adanya kekurangan dalam pelatihan dan kompetensi, pencapaian hasil dari Implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 belum optimal. Pegawai yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan standar tenaga perpustakaan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya adanya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan hasil implementasi.

Ke depan, diharapkan akan ada penambahan sumber daya yang lebih kompeten dalam hal pengelolaan perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung. Peningkatan kualitas pelatihan dan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian yang sesuai akan sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008. Dengan sumber daya yang lebih memadai, pencapaian hasil yang diharapkan dari kebijakan

tersebut dapat terwujud dengan lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di sekolah.

Terkait dengan sikap pelaksana atau disposisi di SMA Negeri 3 Kayuagung, institusi ini telah menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk mendukung implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan. SOP yang telah disusun dengan baik memberikan panduan yang rinci mengenai langkah-langkah yang harus diikuti oleh pelaksana kebijakan. Sebagian besar pelaksana kebijakan di sekolah ini telah memahami dan mengikuti prosedur yang tertera dalam SOP tersebut, yang pada gilirannya mempermudah pelaksanaan tugas mereka.

Kepatuhan terhadap SOP yang jelas menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur yang harus diterapkan. Hal ini berkontribusi pada kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan, karena SOP berfungsi sebagai acuan yang memastikan bahwa semua langkah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP yang terstruktur, pelaksana dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih terorganisir dan terarah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SOP yang jelas dan terdefinisi dengan baik menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung. SOP yang efektif memfasilitasi pelaksana kebijakan dalam mengerjakan tugas mereka, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Pada dimensi struktur birokrasi, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh pelaksana kebijakan di SMA Negeri 3 Kayuagung menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap Implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab guna mencapai tujuan yang diinginkan. Komitmen ini mencerminkan dedikasi dan tanggung jawab yang besar dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa elemen dalam struktur birokrasi yang perlu mendapatkan evaluasi dan perhatian khusus. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menghambat agar dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Perhatian khusus pada elemen-elemen yang menjadi penghalang akan membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan proses implementasi.

Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap elemen-elemen yang menghambat, diharapkan capaian implementasi kebijakan di masa mendatang akan menjadi lebih baik. Upaya perbaikan ini akan membantu dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan kebijakan, serta memastikan bahwa implementasi Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien di SMA Negeri 3 Kayuagung.

6. KESIMPULAN

- 1) Komunikasi yang terjalin dalam Implementasi Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung belum berjalan dengan baik, sehingga hasil yang dicapai menjadi belum optimal. Kedepan, diharapkan akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi, agar setiap permasalahan yang terjadi terkait dengan Implementasi Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung dapat diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya.
- 2) Ada pelatihan khusus yang diberikan kepada pegawai, namun intensitas pelatihan yang tidak terlalu rutin ditambah lagi kompetensi dari pegawai yang kurang mumpuni menyebabkan pelatihan yang diberikan menjadi tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian kerja. Diharapkan kedepan akan ada penambahan sumber daya yang kompeten dalam hal pengelolaan perpustakaan, sehingga dapat meningkatkan pencapaian dan tujuan kebijakan seperti yang tertuang dalam Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan tersebut.
- 3) Implementasi Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung sudah memiliki *standart operating system (SOP)* yang jelas.
- 4) Dalam mengimplementasikan kebijakan, Seluruh pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap Implementasi Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayuagung, dan semaksimal mungkin akan bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang diinginkan, seperti yang tertuang dalam Permendiknas RI No. 25 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian*. Jakarta: Andi Mahasatya.
- Bafadal, I. (2015). *Pengelolaan perpustakaan sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BNSP. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan No. 23 Th. 2006*. Jakarta: Binatama Raya.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamalik, H. O. (2011). *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kalida, M. (2015). *Capacity building perpustakaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Kunandar. (2011). *Guru profesional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, D. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Noerhayati, S. (2000). *Pengelolaan perpustakaan*. Bandung: Offset Alumni.
- Purwanto, A., & Erwan. (2012). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sanjaya, W. (2013). *Strategi pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Syafruddin. (2008). *Efektifitas kebijakan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2010). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widuri, R. N. (2015). *Pena pustakawan*. Bandung: Yrama Widya.
- Yunus, M. (2013). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Wadzuryah.
- Zahroh, A. (2015). *Membangun kualitas pembelajaran melalui dimensi profesionalisme guru*. Bandung: Yrama Widya.